

ABSTRAK

Tesis berjudul “**ASAS KEADILAN DALAM GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012**”, yang diteliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*). Tesis ini membahas mengenai *ratio legis* ketentuan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, dalam tesis ini juga membahas mengenai dasar pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan melihat makna keadilan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta dasar pemberian ganti kerugian yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan studi kasus pada Pembangunan Jalan Tambaklorok Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa asas keadilan merupakan fondasi utama untuk mengatur ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Oleh sebab itu diharapkan adanya keterlibatan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kata Kunci : Asas Keadilan, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah.

ABSTRACT

*The thesis entitled “**THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN COMPENSATION OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2012**” Is researched using normative juridical methods with statute approach, conceptual approach, and case study. This thesis discusses about ratio legis provisions in compensation of land acquisition for public interest. Furthermore, it also studies about the ground of giving the compensation of land acquisition for public interest seen from the meaning of justice based on law number 2 of 2012, as well as the ground of giving the compensation in accordance with the laws and regulations and a case study on Road Development at Tambaklorok, Semarang. The result of the thesis reveals that the principle of justice is the main foundation for regulating the relevant provisions of compensation in land acquisition. Hence, it is expected to have involvement by both the Government and the community at every stage of land acquisition for public interest.*

Key word : *Principle of Justice, Compensation, Land Acquisition*